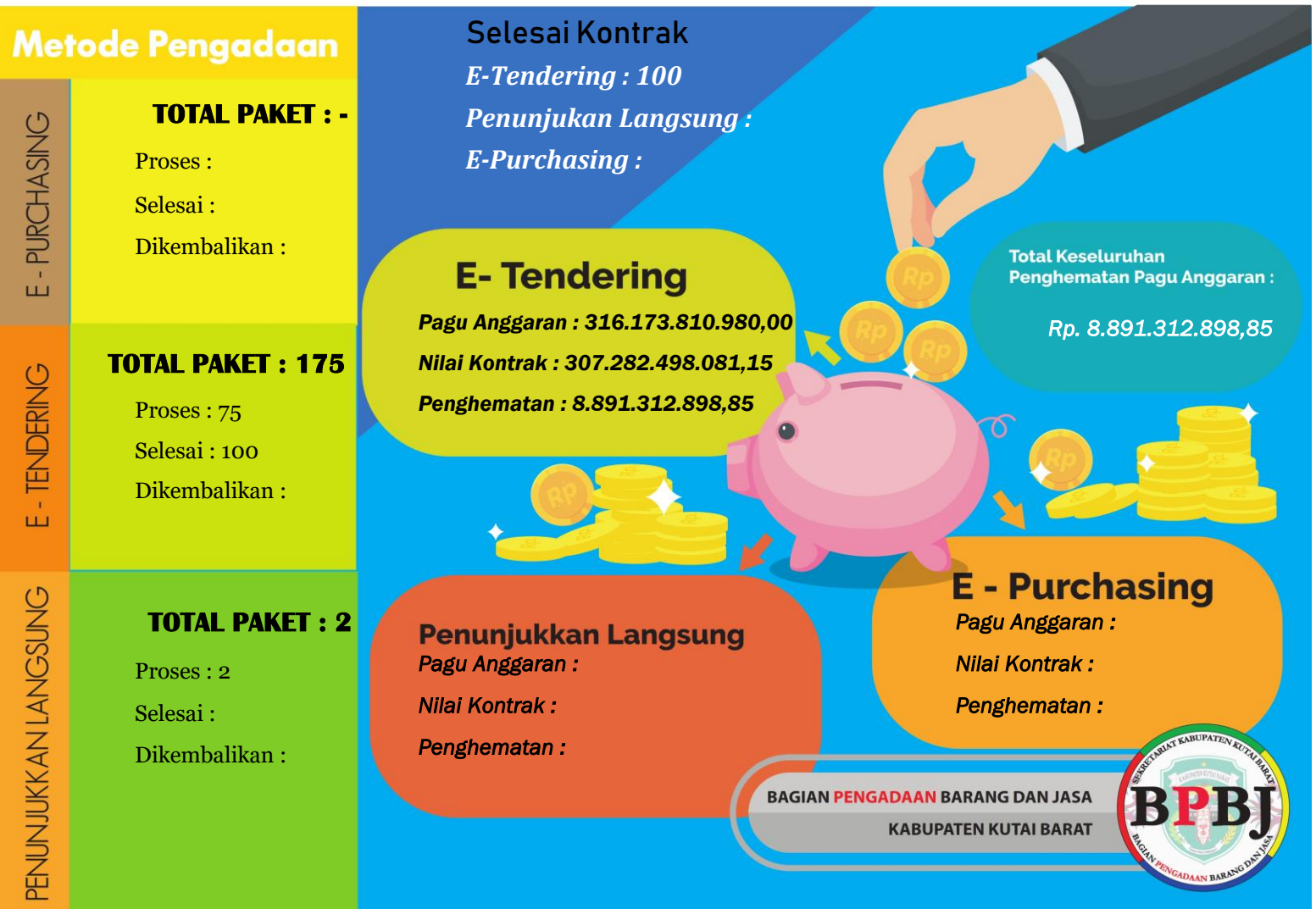


# MONITORING PBJ PER 03 JULI 2019

## •INFOGRAFI•



**TOTAL KESELURUHAN : 177**



BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
KABUPATEN KUTAI BARAT



**LAPORAN SEMESTERAN  
PENGADAAN BARANG/ JASA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**I. PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Urusan pengadaan barang/ jasa merupakan urusan penunjang pada seluruh belanja langsung yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat. Dengan kata lain bahwa urusan pengadaan barang/ jasa dilaksanakan pada seluruh organisasi perangkat daerah yang bermuara pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Kutai Barat.

**B. LANDASAN HUKUM**

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

**II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sampai dengan 3 Juli 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Pendampingan SiRUP Tahun Anggaran 2019 yang dimulai pada bulan November 2018 dan menetapkan batas akhir pada tanggal 28 Februari 2019.
- b. Melakukan rapat membahas pengaruh Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang *Jasa Kontruksi* terhadap pelaksanaan pengadaan barang/ jasa tahun 2019 yang dihadiri oleh Perangkat daerah terkait;
- c. Melakukan diseminasi dan lokakarya dengan mulai tanggal 11 sampai dengan 14 Maret 2019 fokus pada pengendalian kontrak;
- d. Melakukan sosialisasi Perpres 16 Tahun 2018 ke beberapa perangkat daerah antara lain :
  1. Dinas Kesehatan dan seluruh puskesmas di bawahnya;
  2. Dinas Pariwisata fokus pada kaji ulang pemaketan dan pengendalian kontrak;
  3. Dinas Perikanan fokus pada kaji ulang pemaketan dan penyusunan draf kontrak ;
  4. Dinas Lingkungan Hidup fokus pada swakelola tipe IV;
  5. Badan Pendapatan Daerah fokus pada kaji ulang pemaketan pekerjaan;
  6. Dinas Sosial fokus pada KAK dan penyusunan HPS.
- e. Mengadakan rapat evaluasi pengadaan barang/ jasa dan mitigasi risiko pada tanggal 11 April 2019 dengan mengundang perangkat daerah terkait yang dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum. Pada saat rapat sudah terpetakan potensi keterlambatan pekerjaan maka disepakati hasil rapat akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengendalian Pembangunan.
- f. Rapat evaluasi pengadaan barang/ jasa dan mitigasi risiko pada tanggal 18 Juni 2019 dihadiri oleh Wakil Bupati menghasilkan kesepakatan :
  1. Titik kritis layanan tender DAK adalah tanggal 25 Juni 2019 sehingga kontrak dapat diupload ke dalam OMSPAN tanggal 22 Juli 2019;
  2. Titik kritis pelaksanaan tender DID adalah bulan Agustus 2019
  3. Untuk dana selain DAK diserahkan pada BP3D untuk mengendalikan kegiatan pada saat *RADALOP* pada bulan Juli 2019.

4. Pesan Wakil Bupati bahwa kondisi sudah terjadi maka mitigasinya adalah penguatan pada tim pengendali pembangunan.
- g. Rapat dana kelurahan tanggal 3 Juli 2019 dipimpin oleh Sekretaris Daerah menghasilkan hal sebagai berikut :
  1. Baru diketahui bahwa terdapat dua sumber dana untuk Kelurahan yaitu DAU Tambahan dan APBD Murni. Untuk DAU Tambahan ditargetkan bahwa penyaluran dana tahap II dilakukan jika dana tahap I telah terealisasi sebesar 50% paling lambat 16 Agustus 2019;
  2. Sekretaris Daerah memerintahkan untuk tetap berupaya melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat karena berdampak pada alokasi dana dan penilaian Pemerintah Pusat terhadap kinerja Pemerintah Daerah;
  3. Atas dasar point ke dua maka Bagian PBJ setelah rapat melakukan fasilitasi kaji ulang pemaketan pekerjaan guna mengejar realisasi 50% dari pencairan tahap I DAU Tambahan.
- h. Layanan tender dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mulai Januari sampai dengan 3 Juli 2019 (laporan layanan terlampir).

### **III. ANALISIS**

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai saat laporan ini disusun dapat disampaikan analisis sebagai berikut :

- A. Simpul yang menghambat pelaksanaan kegiatan adalah :
  1. Distribusi personil yang memiliki sertifikat tidak merata di perangkat daerah;
  2. RKA disusun tanpa didukung kerangka acuan kerja yang logis yang memuat tujuan, skedul, dan metode pelaksanaan kegiatan;
  3. Belum ada penetapan titik kritis pada saat penetapan anggaran sebuah kegiatan
  4. Lambatnya penetapan surat keputusan penerima kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan;
  5. Pemaketan pekerjaan yang menggabungkan perencanaan dan fisik dalam tahun anggaran yang sama;
  6. Pertentangan internal yang tidak diselesaikan (bisa PPTK dengan PPK atau PPK dengan KPA/ PA).
  7. Paket pekerjaan dalam RUP tidak dirincikan per sumber dana sehingga menyulitkan pemetaan dalam pelaksanaan monitoring.
- B. Pekerjaan yang terdampak/ tidak dapat diteruskan pada tahun 2019 senilai Rp Rp10.653.994.200,00, dengan rincian berupa kelompok kegiatan sebagai berikut :
  1. Pemeliharaan Kantor Bupati (PUPR)
  2. Pengawasan Pemeliharaan Kantor Bupati (PUPR)
  3. Rehabilitasi rumah dinas Bupati
  4. Pengawasan rumah dinas Bupati
  5. IPAL Puskesmas (DAK Kesehatan)
  6. IPAL Puskesmas (DAK Kesehatan)
  7. Pergantian Jaringan Instalasi Listrik RSUD HIS (PUPR)
  8. Pengawasan Pergantian Jaringan Instalasi Listrik RSUD HIS (PUPR)

### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis yang ada maka disimpulkan perlu kebijakan terintegrasi dalam rangka pencegahan kondisi yang dihadapi beberapa tahun terakhir.

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan alokasi anggaran untuk pemenuhan sertifikasi kompetensi pengadaan barang/ jasa dengan memperhatikan standar kebutuhan minimal

tiap organisasi perangkat daerah (disusun bersama BKP2D, Bagian Organisasi dan BPBJ).

2. Penguatan TAPD dalam melakukan asistensi RKA.
3. TAPD menetapkan titik kritis berdasarkan :
  - a. masa kerja kegiatan/ paket kegiatan; dan/ atau
  - b. sumber dana (DAK/ DID/ DAU Tambahan/ DBH DR/ Banprov).
4. Penetapan Pengelola Keuangan terbit pada November TA-1, dan PA/ KPA menetapkan PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, PjPHP/ PPHP terbit pada Desember TA-1 (SOP disusun oleh Inspektorat dan BKAD).
5. Menghindari atau meniadakan paket pekerjaan yang menggabungkan perencanaan dan pelaksanaan fisik pada tahun yang sama (pengetatan oleh TAPD).
6. Penguatan tim monitoring dan evaluasi pembangunan dalam mencermati kolom masalah dalam laporan realisasi fisik dan keuangan (BP3D, Bagian Pembangunan dan BKAD).
7. Bagian PBJ akan menyusun gelombang layanan pemaketan pekerjaan. Gelombang layanan prioritas yang dirancang adalah sebagai berikut :
  - a. November sd Desember TA-1 untuk paket dengan masa kerja 7 sampai dengan 12 bulan;
  - b. Januari sd Maret untuk paket dengan masa kerja 5 sampai 6 bulan dan paket yang bersumber dari DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi;
  - c. April sd Mei untuk paket dengan masa kerja 3 sampai 4 bulan dan paket yang bersumber dari DID, DBH DR dan dana kelurahan;
  - d. Di atas bulan Juni untuk paket yang bersumber dari APBD Murni yang masa kerjanya di bawah 3 bulan.

Jika gelombang ini disetujui maka tahapan yang dan kebijakan yang perlu dirancang adalah sebagai berikut :

- Pada akhir tahun setelah penyusunan RKA maka RUP segera diupload paling lambat Januari TA berjalan;
- Pada akhir TA – 1, Sekretaris Daerah melalui TAPD menetapkan titik kritis tiap paket kegiatan yang wajib dipatuhi oleh PA/ KPA;
- Jika titik kritis terlampaui lebih dari 5% maka Tim Pengendali tingkat Kabupaten melakukan rapat pembuktian untuk menyusun program percepatan;
- PA/ KPA adalah penanggung jawab kinerja perangkat daerah maka jika terjadi keterlambatan surat peringatan ditujukan kepada PA/ KPA.
- teguran yang diberikan hanya untuk paket/ kegiatan yang telah ditetapkan sebagai prioritas pada TA berjalan.

Demikian laporan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ini disampaikan, sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

**Kepala Bagian Pengadaan Barang  
dan Jasa,**

Paraf Hierarkhis	
Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Penyelesaian Sanggah	
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pembinaan	
Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	

**Leonard Yudianto, S.E**  
**NIP. 19780615 200212 1 008**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat 75576. Telepon (0545) 4043841 – 4043704  
Fax (0545) 4043843. Website : www.kutai Barat kab.go.id

SENDAWAR

**LAPORAN MONITORING PENGADAAN BARANG DAN JASA  
KABUPATEN KUTAI BARAT  
PER-03 JULI TAHUN 2019**

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel maka bersama ini kami sampaikan laporan monitoring pengadaan barang dan jasa sebagai berikut :

**1. Realisasi pelayanan paket pada OPD per 03 Juli 2019**

No.	Nama OPD	Paket Tender dan Seleksi			
		Target	paket masuk	sisia paket	bobot
1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	3	-	100%
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5	-	5	0%
3	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1	-	1	0%
4	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	2	2	-	100%
5	BAGIAN ORGANISASI	1	1	-	100%
6	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	1	-	1	0%
7	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	4	2	2	50%
8	DINAS KESEHATAN	5	3	2	60%
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	1	-	100%
10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	132	125	7	95%
11	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	1	1	-	100%
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	1	-	100%
13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	24	21	3	88%
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2	2	-	100%
15	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	7	5	2	71%
16	DINAS PERHUBUNGAN	2	2	-	100%
17	DINAS PERHUBUNGAN UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	2	-	2	0%
18	DINAS PERIKANAN	9	3	6	33%
19	DINAS PERTANIAN	9	1	8	11%
20	DINAS PUPR UPT PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	3	3	-	100%
21	KELURAHAN BARONG TONGKOK	1	-	1	0%
22	RSUD HARAPAN INSAN SENDAWAR	2	-	2	0%

23	SEKRETARIAT DPRD	1	1	-	100%
	<b>JUMLAH</b>	<b>219</b>	<b>177</b>	<b>42</b>	<b>80,82%</b>

## 2. Realisasi kontrak menurut jenis pekerjaan per 03 Juli 2019

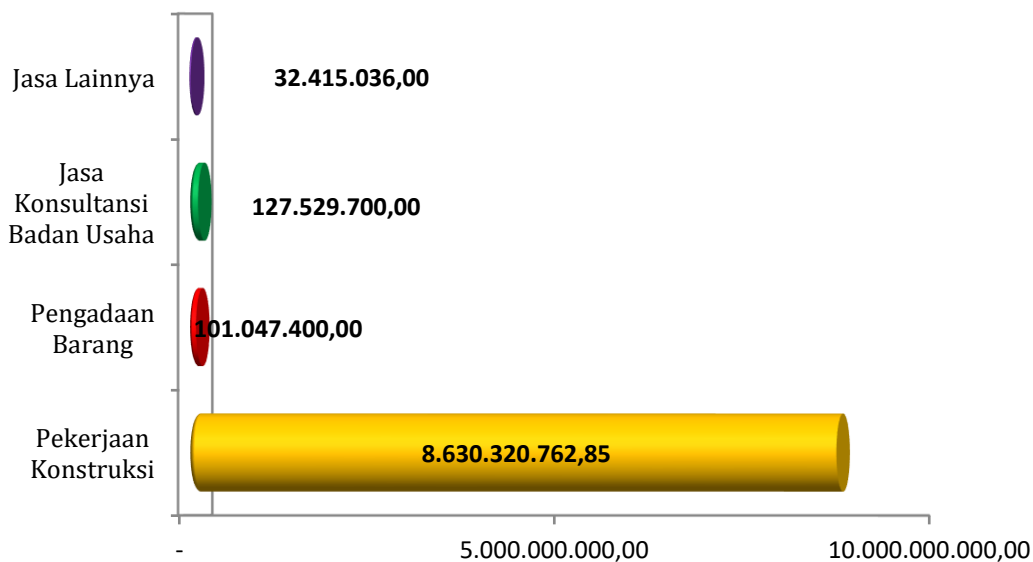
No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Paket
1	Pekerjaan Konstruksi	88
2	Pengadaan Barang	3
3	Jasa Konsultansi Badan Usaha	7
4	Jasa Lainnya	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>100</b>



### 3. Penghematan atas pagu anggaran per 03 Juli 2019

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Pagu Anggaran	Nilai Kontrak
1	Pekerjaan Konstruksi	307.743.914.980,00	299.113.594.217,15
2	Pengadaan Barang	1.119.896.000,00	1.018.848.600,00
3	Jasa Konsultansi Badan Usaha	1.805.000.000,00	1.677.470.300,00
4	Jasa Lainnya	5.505.000.000,00	5.472.584.964,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>316.173.810.980,00</b>	<b>307.282.498.081,15</b>

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penghematan Anggaran (Rp)
1	Pekerjaan Konstruksi	8.630.320.762,85
2	Pengadaan Barang	101.047.400,00
3	Jasa Konsultansi Badan Usaha	127.529.700,00
4	Jasa Lainnya	32.415.036,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.891.312.898,85</b>



**Grafik Penghematan atas pagu anggaran**

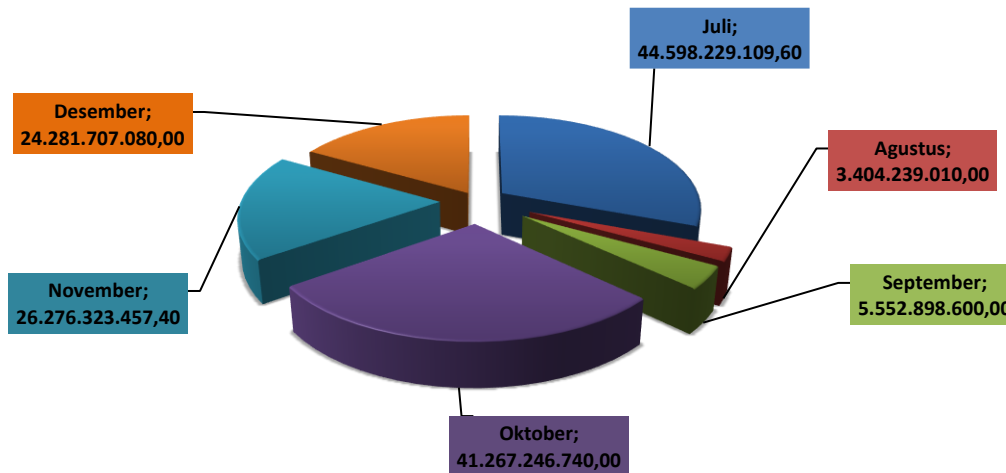


**4. Prognosis Kontrak bulan Juli s.d Desember 2019**

No.	Bulan	Mulai Kontrak
1	Juli	118
2	Agustus	-
3	September	1
4	Oktober	-
5	November	-
6	Desember	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>119</b>

**5. Prognosis Aliran Keluar bulan Juli s.d Desember 2019**

No.	Bulan	prognosis aliran keluar
1	Juli	44.598.229.109,60
2	Agustus	3.404.239.010,00
3	September	5.552.898.600,00
4	Oktober	41.267.246.740,00
5	November	26.276.323.457,40
6	Desember	24.281.707.080,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>145.380.643.997,00</b>



Demikian Laporan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa per-3 Juli Tahun 2019 ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sendawar, 3 Juli 2019

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa  
Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat

<b>Paraf Hierarkis</b>	
Kepala Sub-Bagian Evaluasi dan Penyelesaian Sanggah	
Kepala Sub-Bagian Perencanaan dan Pembinaan	

**LEONARD YUDIARTO, SE**  
NIP. 19780615 200212 1 008

